



**PEMERINTAHAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

Sub. Bagian Keuangan dan Aset

Dasar Hukum

1. Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. Undang-Undang No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
4. Undang-Undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
5. Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
6. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dimana Kewenangan dibidang Energi dan Sumber Daya Mineral
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Th.2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Th.2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
10. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
14. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No 2 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
15. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No 27 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No 80 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan sosial.
16. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 69 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016

Keterkaitan SOP

Peringatan

Laporan harus disampaikan selambat-lambatnya tanggal 10 setiap bulan.

Nomor SOP	:	
Tanggal Pembuatan	:	Januari 2018
Tanggal Revisi	:	
Tanggal Pengesahan	:	Januari 2018
Disahkan oleh	:	KEPALA DINAS, ERMAL SUBHAN, ST, MT Pembina Tingkat I NIP. 19690206 199603 1 003

Nama SOP : **Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan, Triwulan dan Semester**

Kualifikasi Pelaksana

1. Mengerti dan memahami BKU, pajak dan realisasi keuangan
2. Mengerti dan memahami laporan keuangan
3. Mampu menyusun laporan keuangan
4. Mampu mengoperasikan Aplikasi SIMDA

Peralatan/ Perlengkapan

1. BKU
2. Pajak/SSP
3. Rekap Realisasi Belanja
4. Rekap Rekening Koran Perbulan
5. Penutupan Kas
6. Pemeriksaan Kas
7. Rekonsiliasi Kas

Pencatatan & Pendataan

 PEMERINTAHAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Nomor SOP</td> <td style="width: 10%;">:</td> <td style="width: 70%;"></td> </tr> <tr> <td>Tanggal Pembuatan</td> <td>:</td> <td>Januari 2018</td> </tr> <tr> <td>Tanggal Revisi</td> <td>:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tanggal Pengesahan</td> <td>:</td> <td>Januari 2018</td> </tr> <tr> <td>Disahkan oleh</td> <td>:</td> <td style="text-align: center;">KEPALA DINAS, ERMAL SUBHAN, ST, MT Pembina Tingkat I NIP. 19690206 199603 1 003</td> </tr> </table>	Nomor SOP	:		Tanggal Pembuatan	:	Januari 2018	Tanggal Revisi	:		Tanggal Pengesahan	:	Januari 2018	Disahkan oleh	:	KEPALA DINAS, ERMAL SUBHAN, ST, MT Pembina Tingkat I NIP. 19690206 199603 1 003
Nomor SOP	:															
Tanggal Pembuatan	:	Januari 2018														
Tanggal Revisi	:															
Tanggal Pengesahan	:	Januari 2018														
Disahkan oleh	:	KEPALA DINAS, ERMAL SUBHAN, ST, MT Pembina Tingkat I NIP. 19690206 199603 1 003														
Sub. Bagian Keuangan dan Aset	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Nama SOP</td> <td style="width: 10%;">:</td> <td style="width: 70%;">Penyusunan Laporan Keuangan Tahunan</td> </tr> </table>	Nama SOP	:	Penyusunan Laporan Keuangan Tahunan												
Nama SOP	:	Penyusunan Laporan Keuangan Tahunan														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="background-color: #f2f2f2;">Dasar Hukum</td> </tr> <tr> <td> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. Undang-Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 3. Undang-Undang No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 4. Undang-Undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 5. Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. 6. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dimana Kewenangan dibidang Energi dan Sumber Daya Mineral menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Provinsi 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Th.2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Th.2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 10. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 14. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No 2 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 15. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No 27 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No 80 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan sosial. 16. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 69 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 </td> </tr> </table>	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. Undang-Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 3. Undang-Undang No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 4. Undang-Undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 5. Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. 6. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dimana Kewenangan dibidang Energi dan Sumber Daya Mineral menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Provinsi 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Th.2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Th.2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 10. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 14. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No 2 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 15. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No 27 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No 80 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan sosial. 16. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 69 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="background-color: #f2f2f2;">Kualifikasi Pelaksana</td> </tr> <tr> <td> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui dan memahami BKU akhir tahun, rekening koran, Neraca, LRA, berita acara penutupan kas 2. Mengetahui dan memahami laporan keuangan tahunan 3. Mampu menyusun laporan keuangan tahunan </td> </tr> </table>	Kualifikasi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui dan memahami BKU akhir tahun, rekening koran, Neraca, LRA, berita acara penutupan kas 2. Mengetahui dan memahami laporan keuangan tahunan 3. Mampu menyusun laporan keuangan tahunan 											
Dasar Hukum																
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. Undang-Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 3. Undang-Undang No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 4. Undang-Undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 5. Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. 6. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dimana Kewenangan dibidang Energi dan Sumber Daya Mineral menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Provinsi 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Th.2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Th.2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 10. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 14. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No 2 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 15. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No 27 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No 80 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan sosial. 16. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 69 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 																
Kualifikasi Pelaksana																
<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui dan memahami BKU akhir tahun, rekening koran, Neraca, LRA, berita acara penutupan kas 2. Mengetahui dan memahami laporan keuangan tahunan 3. Mampu menyusun laporan keuangan tahunan 																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="background-color: #f2f2f2;">Keterkaitan SOP</td> </tr> <tr> <td> <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Kartu Inventaris Barang 2. SOP Laporan Keuangan Bulanan, Triwulan dan Semesteran </td> </tr> </table>	Keterkaitan SOP	<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Kartu Inventaris Barang 2. SOP Laporan Keuangan Bulanan, Triwulan dan Semesteran 	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="background-color: #f2f2f2;">Peralatan/ Perlengkapan</td> </tr> <tr> <td> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; border: none;"> <ol style="list-style-type: none"> 1. BKU 2. Neraca 3. LRA 4. Rekap Rekening Koran 1 Tahun 5. Penutupan Kas 6. Pemeriksaan Kas </td> <td style="width: 50%; border: none;"> <ol style="list-style-type: none"> 5. Rekonsiliasi Kas 6. KIB 7. Stock offname 8. Pembukuan 9. Kewajiban Kepada Pihak Ketiga 10. Pembayaran Dimuka 11. Calk </td> </tr> </table> </td> </tr> </table>	Peralatan/ Perlengkapan	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; border: none;"> <ol style="list-style-type: none"> 1. BKU 2. Neraca 3. LRA 4. Rekap Rekening Koran 1 Tahun 5. Penutupan Kas 6. Pemeriksaan Kas </td> <td style="width: 50%; border: none;"> <ol style="list-style-type: none"> 5. Rekonsiliasi Kas 6. KIB 7. Stock offname 8. Pembukuan 9. Kewajiban Kepada Pihak Ketiga 10. Pembayaran Dimuka 11. Calk </td> </tr> </table>	<ol style="list-style-type: none"> 1. BKU 2. Neraca 3. LRA 4. Rekap Rekening Koran 1 Tahun 5. Penutupan Kas 6. Pemeriksaan Kas 	<ol style="list-style-type: none"> 5. Rekonsiliasi Kas 6. KIB 7. Stock offname 8. Pembukuan 9. Kewajiban Kepada Pihak Ketiga 10. Pembayaran Dimuka 11. Calk 									
Keterkaitan SOP																
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Kartu Inventaris Barang 2. SOP Laporan Keuangan Bulanan, Triwulan dan Semesteran 																
Peralatan/ Perlengkapan																
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; border: none;"> <ol style="list-style-type: none"> 1. BKU 2. Neraca 3. LRA 4. Rekap Rekening Koran 1 Tahun 5. Penutupan Kas 6. Pemeriksaan Kas </td> <td style="width: 50%; border: none;"> <ol style="list-style-type: none"> 5. Rekonsiliasi Kas 6. KIB 7. Stock offname 8. Pembukuan 9. Kewajiban Kepada Pihak Ketiga 10. Pembayaran Dimuka 11. Calk </td> </tr> </table>	<ol style="list-style-type: none"> 1. BKU 2. Neraca 3. LRA 4. Rekap Rekening Koran 1 Tahun 5. Penutupan Kas 6. Pemeriksaan Kas 	<ol style="list-style-type: none"> 5. Rekonsiliasi Kas 6. KIB 7. Stock offname 8. Pembukuan 9. Kewajiban Kepada Pihak Ketiga 10. Pembayaran Dimuka 11. Calk 														
<ol style="list-style-type: none"> 1. BKU 2. Neraca 3. LRA 4. Rekap Rekening Koran 1 Tahun 5. Penutupan Kas 6. Pemeriksaan Kas 	<ol style="list-style-type: none"> 5. Rekonsiliasi Kas 6. KIB 7. Stock offname 8. Pembukuan 9. Kewajiban Kepada Pihak Ketiga 10. Pembayaran Dimuka 11. Calk 															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="background-color: #f2f2f2;">Peringatan</td> </tr> <tr> <td>Laporan harus disampaikan selambat-lambatnya bulan maret tahun berikutnya</td> </tr> </table>	Peringatan	Laporan harus disampaikan selambat-lambatnya bulan maret tahun berikutnya	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="background-color: #f2f2f2;">Pencatatan & Pendataan</td> </tr> <tr> <td></td> </tr> </table>	Pencatatan & Pendataan												
Peringatan																
Laporan harus disampaikan selambat-lambatnya bulan maret tahun berikutnya																
Pencatatan & Pendataan																

 PEMERINTAHAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Nomor SOP</td> <td style="width: 5%;">:</td> <td style="width: 80%;"></td> </tr> <tr> <td>Tanggal Pembuatan</td> <td>:</td> <td>Januari 2018</td> </tr> <tr> <td>Tanggal Revisi</td> <td>:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tanggal Pengesahan</td> <td>:</td> <td>Januari 2018</td> </tr> <tr> <td>Disahkan oleh</td> <td>:</td> <td style="text-align: center;"> KEPALA DINAS, ERMAL SUBHAN, ST, MT Pembina Tingkat I NIP. 19690206 199603 1 003 </td> </tr> </table>	Nomor SOP	:		Tanggal Pembuatan	:	Januari 2018	Tanggal Revisi	:		Tanggal Pengesahan	:	Januari 2018	Disahkan oleh	:	KEPALA DINAS, ERMAL SUBHAN, ST, MT Pembina Tingkat I NIP. 19690206 199603 1 003
Nomor SOP	:															
Tanggal Pembuatan	:	Januari 2018														
Tanggal Revisi	:															
Tanggal Pengesahan	:	Januari 2018														
Disahkan oleh	:	KEPALA DINAS, ERMAL SUBHAN, ST, MT Pembina Tingkat I NIP. 19690206 199603 1 003														
Sub. Bagian Keuangan dan Aset	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Nama SOP</td> <td style="width: 5%;">:</td> <td style="width: 80%;">Pengajuan SPP - UP SPM - UP</td> </tr> </table>	Nama SOP	:	Pengajuan SPP - UP SPM - UP												
Nama SOP	:	Pengajuan SPP - UP SPM - UP														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="background-color: #f2f2f2;">Dasar Hukum</td> </tr> <tr> <td> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. Undang-Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 3. Undang-Undang No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 4. Undang-Undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 5. Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. 6. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dimana Kewenangan dibidang Energi dan Sumber Daya Mineral menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Provinsi 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Th.2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Th.2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 10. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 14. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No 2 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 15. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No 27 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No 80 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan sosial. 16. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 69 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 </td> </tr> </table>	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. Undang-Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 3. Undang-Undang No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 4. Undang-Undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 5. Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. 6. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dimana Kewenangan dibidang Energi dan Sumber Daya Mineral menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Provinsi 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Th.2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Th.2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 10. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 14. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No 2 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 15. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No 27 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No 80 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan sosial. 16. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 69 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="background-color: #f2f2f2;">Kualifikasi Pelaksana</td> </tr> <tr> <td> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami aplikasi SIMDA 2. Mengetahui dan mengerti DPA 3. Memahami Proses dan Prosedur Pengajuan SPP UP dan SPM UP </td> </tr> </table>	Kualifikasi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami aplikasi SIMDA 2. Mengetahui dan mengerti DPA 3. Memahami Proses dan Prosedur Pengajuan SPP UP dan SPM UP 											
Dasar Hukum																
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. Undang-Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 3. Undang-Undang No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 4. Undang-Undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 5. Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. 6. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dimana Kewenangan dibidang Energi dan Sumber Daya Mineral menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Provinsi 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Th.2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Th.2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 10. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 14. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No 2 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 15. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No 27 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No 80 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan sosial. 16. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 69 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 																
Kualifikasi Pelaksana																
<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami aplikasi SIMDA 2. Mengetahui dan mengerti DPA 3. Memahami Proses dan Prosedur Pengajuan SPP UP dan SPM UP 																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="background-color: #f2f2f2;">Keterkaitan SOP</td> </tr> <tr> <td> </td> </tr> </table>	Keterkaitan SOP		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="background-color: #f2f2f2;">Peralatan/ Perlengkapan</td> </tr> <tr> <td> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lembar Kontrol / Lembar Verifikasi Pengajuan UP 2. SPTJB 3. DPA yang telah disahkan 4. SK SPD </td> </tr> </table>	Peralatan/ Perlengkapan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lembar Kontrol / Lembar Verifikasi Pengajuan UP 2. SPTJB 3. DPA yang telah disahkan 4. SK SPD 											
Keterkaitan SOP																
Peralatan/ Perlengkapan																
<ol style="list-style-type: none"> 1. Lembar Kontrol / Lembar Verifikasi Pengajuan UP 2. SPTJB 3. DPA yang telah disahkan 4. SK SPD 																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="background-color: #f2f2f2;">Peringatan</td> </tr> <tr> <td> <ol style="list-style-type: none"> 1. Apabila pengajuan SPP UP tidak dilaksanakan maka berpengaruh pada Ketersediaan Kas DCKTK 2. Pelaksanaan kegiatan menunggu kesiapan dana pada rekening bendahara </td> </tr> </table>	Peringatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apabila pengajuan SPP UP tidak dilaksanakan maka berpengaruh pada Ketersediaan Kas DCKTK 2. Pelaksanaan kegiatan menunggu kesiapan dana pada rekening bendahara 	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="background-color: #f2f2f2;">Pencatatan & Pendataan</td> </tr> <tr> <td>Rencana Kebutuhan Keuangan untuk persiapan/pembiayaan kegiatan</td> </tr> </table>	Pencatatan & Pendataan	Rencana Kebutuhan Keuangan untuk persiapan/pembiayaan kegiatan											
Peringatan																
<ol style="list-style-type: none"> 1. Apabila pengajuan SPP UP tidak dilaksanakan maka berpengaruh pada Ketersediaan Kas DCKTK 2. Pelaksanaan kegiatan menunggu kesiapan dana pada rekening bendahara 																
Pencatatan & Pendataan																
Rencana Kebutuhan Keuangan untuk persiapan/pembiayaan kegiatan																



PEMERINTAHAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Sub. Bagian Keuangan dan Aset

Dasar Hukum

1. Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. Undang-Undang No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
4. Undang-Undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
5. Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
6. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dimana Kewenangan dibidang Energi dan Sumber Daya Mineral menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Provinsi
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Th.2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Th.2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
10. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
14. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No 2 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
15. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No 27 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No 80 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan sosial.
16. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 69 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016

Keterkaitan SOP

Peringatan

1. Berpengaruh pada Ketersediaan Kas DCKTK
2. Pelaksanaan kegiatan menunggu kesiapan dana pada rekening bendahara

Nomor SOP	:	
Tanggal Pembuatan	:	Januari 2018
Tanggal Revisi	:	
Tanggal Pengesahan	:	Januari 2018
Disahkan oleh	:	KEPALA DINAS, ERMAL SUBHAN, ST, MT Pembina Tingkat I NIP. 19690206 199603 1 003
Nama SOP	:	Pengajuan SPP - GU SPM - GU

Kualifikasi Pelaksana

1. Memahami aplikasi SIMDA
2. Mengetahui dan mengerti DPA
3. Memahami Proses dan Prosedur Pengajuan SPP GU dan SPM - GU

Peralatan/ Perlengkapan

1. Lembar Kontrol / Lembar Verifikasi Pengajuan GU
2. SPTJB
3. DPA yang telah disahkan
4. Dokumen SPJ
5. SK SPD

Pencatatan & Pendataan

Rencana Kebutuhan Keuangan untuk persiapan/pembiayaan kegiatan

 <p>PEMERINTAHAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL</p>	<table border="1"> <tr> <td>Nomor SOP</td> <td>:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tanggal Pembuatan</td> <td>:</td> <td>Januari 2018</td> </tr> <tr> <td>Tanggal Revisi</td> <td>:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tanggal Pengesahan</td> <td>:</td> <td>Januari 2018</td> </tr> <tr> <td>Disahkan oleh</td> <td>:</td> <td style="text-align: center;">KEPALA DINAS, ERMAL SUBHAN, ST, MT Pembina Tingkat I NIP. 19690206 199603 1 003</td> </tr> </table>	Nomor SOP	:		Tanggal Pembuatan	:	Januari 2018	Tanggal Revisi	:		Tanggal Pengesahan	:	Januari 2018	Disahkan oleh	:	KEPALA DINAS, ERMAL SUBHAN, ST, MT Pembina Tingkat I NIP. 19690206 199603 1 003
Nomor SOP	:															
Tanggal Pembuatan	:	Januari 2018														
Tanggal Revisi	:															
Tanggal Pengesahan	:	Januari 2018														
Disahkan oleh	:	KEPALA DINAS, ERMAL SUBHAN, ST, MT Pembina Tingkat I NIP. 19690206 199603 1 003														
Sub. Bagian Keuangan dan Aset	Nama SOP : Pengajuan SPP - LS Gaji SPM - LS Gaji															
<p>Dasar Hukum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. Undang-Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 3. Undang-Undang No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 4. Undang-Undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 5. Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. 6. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dimana Kewenangan dibidang Energi dan Sumber Daya Mineral menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Provinsi 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Th.2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Th.2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 10. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 14. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No 2 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 15. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No 27 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No 80 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan sosial. 16. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 69 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 	<p>Kualifikasi Pelaksana</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami aplikasi SIMDA 2. Mengetahui dan mengerti DPA 3. Memahami Proses dan Prosedur Pengajuan SPP LS Gaji dan SPM - LS Gaji 															
<p>Keterkaitan SOP</p>	<p>Peralatan/ Perlengkapan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lembar Kontrol / Lembar Verifikasi Pengajuan LS Gaji 2. SPTJB 3. DPA yang telah disahkan 4. Daftar Gaji 5. SK SPD 															
<p>Peringatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Proses pengajuan SPP TU dan SPM TU berpengaruh pada ketersediaan kas DCKTK 2. Pelaksanaan kegiatan menunggu kesiapan dana pada rekening bendahara 	<p>Pencatatan & Pendataan</p>															

 PEMERINTAHAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Nomor SOP</td> <td style="width: 10%;">:</td> <td style="width: 60%;"></td> </tr> <tr> <td>Tanggal Pembuatan</td> <td>:</td> <td>Januari 2018</td> </tr> <tr> <td>Tanggal Revisi</td> <td>:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tanggal Pengesahan</td> <td>:</td> <td>Januari 2018</td> </tr> <tr> <td>Disahkan oleh</td> <td>:</td> <td style="text-align: center;"> KEPALA DINAS, ERMAL SUBHAN, ST, MT Pembina Tingkat I NIP. 19690206 199603 1 003 </td> </tr> </table>	Nomor SOP	:		Tanggal Pembuatan	:	Januari 2018	Tanggal Revisi	:		Tanggal Pengesahan	:	Januari 2018	Disahkan oleh	:	KEPALA DINAS, ERMAL SUBHAN, ST, MT Pembina Tingkat I NIP. 19690206 199603 1 003
Nomor SOP	:															
Tanggal Pembuatan	:	Januari 2018														
Tanggal Revisi	:															
Tanggal Pengesahan	:	Januari 2018														
Disahkan oleh	:	KEPALA DINAS, ERMAL SUBHAN, ST, MT Pembina Tingkat I NIP. 19690206 199603 1 003														
Sub. Bagian Keuangan dan Aset	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Nama SOP</td> <td style="width: 10%;">:</td> <td style="width: 60%;">Pengajuan SPP - LS BJ SPM - LS - BJ</td> </tr> </table>	Nama SOP	:	Pengajuan SPP - LS BJ SPM - LS - BJ												
Nama SOP	:	Pengajuan SPP - LS BJ SPM - LS - BJ														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="background-color: black; color: white;">Dasar Hukum</td> </tr> <tr> <td> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. Undang-Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 3. Undang-Undang No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 4. Undang-Undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 5. Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. 6. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dimana Kewenangan dibidang Energi dan Sumber Daya Mineral menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Provinsi 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Th.2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Th.2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 10. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 14. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No 2 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 15. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No 27 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No 80 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan sosial. 16. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 69 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 </td> </tr> </table>	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. Undang-Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 3. Undang-Undang No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 4. Undang-Undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 5. Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. 6. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dimana Kewenangan dibidang Energi dan Sumber Daya Mineral menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Provinsi 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Th.2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Th.2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 10. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 14. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No 2 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 15. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No 27 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No 80 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan sosial. 16. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 69 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="background-color: black; color: white;">Kualifikasi Pelaksana</td> </tr> <tr> <td> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami aplikasi SIMDA 2. Mengetahui dan mengerti DPA 3. Memahami Proses dan Prosedur Pengajuan SPP - LS BJ SPM - LS - BJ </td> </tr> </table>	Kualifikasi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami aplikasi SIMDA 2. Mengetahui dan mengerti DPA 3. Memahami Proses dan Prosedur Pengajuan SPP - LS BJ SPM - LS - BJ 											
Dasar Hukum																
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. Undang-Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 3. Undang-Undang No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 4. Undang-Undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 5. Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. 6. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dimana Kewenangan dibidang Energi dan Sumber Daya Mineral menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Provinsi 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Th.2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Th.2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 10. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 14. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No 2 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 15. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No 27 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No 80 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan sosial. 16. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 69 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 																
Kualifikasi Pelaksana																
<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami aplikasi SIMDA 2. Mengetahui dan mengerti DPA 3. Memahami Proses dan Prosedur Pengajuan SPP - LS BJ SPM - LS - BJ 																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="background-color: black; color: white;">Keterkaitan SOP</td> </tr> <tr> <td> </td> </tr> </table>	Keterkaitan SOP		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="background-color: black; color: white;">Peralatan/ Perlengkapan</td> </tr> <tr> <td> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lembar Kontrol / Lembar Verifikasi Pengajuan SPP - LS BJ SPM - LS - BJ 2. SPTJB 3. DPA yang telah disahkan 4. Salinan SPD 5. SK SPD </td> </tr> </table>	Peralatan/ Perlengkapan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lembar Kontrol / Lembar Verifikasi Pengajuan SPP - LS BJ SPM - LS - BJ 2. SPTJB 3. DPA yang telah disahkan 4. Salinan SPD 5. SK SPD 											
Keterkaitan SOP																
Peralatan/ Perlengkapan																
<ol style="list-style-type: none"> 1. Lembar Kontrol / Lembar Verifikasi Pengajuan SPP - LS BJ SPM - LS - BJ 2. SPTJB 3. DPA yang telah disahkan 4. Salinan SPD 5. SK SPD 																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="background-color: black; color: white;">Peringatan</td> </tr> <tr> <td> <ol style="list-style-type: none"> 1. Proses pengajuan SPP TU dan SPM TU berpengaruh pada ketersediaan kas DCKTK 2. Pelaksanaan kegiatan menunggu kesiapan dana pada rekening bendahara </td> </tr> </table>	Peringatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proses pengajuan SPP TU dan SPM TU berpengaruh pada ketersediaan kas DCKTK 2. Pelaksanaan kegiatan menunggu kesiapan dana pada rekening bendahara 	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="background-color: black; color: white;">Pencatatan & Pendataan</td> </tr> <tr> <td> </td> </tr> </table>	Pencatatan & Pendataan												
Peringatan																
<ol style="list-style-type: none"> 1. Proses pengajuan SPP TU dan SPM TU berpengaruh pada ketersediaan kas DCKTK 2. Pelaksanaan kegiatan menunggu kesiapan dana pada rekening bendahara 																
Pencatatan & Pendataan																

 PEMERINTAHAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Nomor SOP</td> <td style="width: 5%;">:</td> <td style="width: 75%;"></td> </tr> <tr> <td>Tanggal Pembuatan</td> <td>:</td> <td>Januari 2018</td> </tr> <tr> <td>Tanggal Revisi</td> <td>:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tanggal Pengesahan</td> <td>:</td> <td>Januari 2018</td> </tr> <tr> <td>Disahkan oleh</td> <td>:</td> <td style="text-align: center;"> KEPALA DINAS, ERMAL SUBHAN, ST, MT Pembina Tingkat I NIP. 19690206 199603 1 003 </td> </tr> </table>	Nomor SOP	:		Tanggal Pembuatan	:	Januari 2018	Tanggal Revisi	:		Tanggal Pengesahan	:	Januari 2018	Disahkan oleh	:	KEPALA DINAS, ERMAL SUBHAN, ST, MT Pembina Tingkat I NIP. 19690206 199603 1 003
Nomor SOP	:															
Tanggal Pembuatan	:	Januari 2018														
Tanggal Revisi	:															
Tanggal Pengesahan	:	Januari 2018														
Disahkan oleh	:	KEPALA DINAS, ERMAL SUBHAN, ST, MT Pembina Tingkat I NIP. 19690206 199603 1 003														
Sub. Bagian Keuangan dan Aset	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Nama SOP</td> <td style="width: 5%;">:</td> <td style="width: 75%;">Pengajuan SPP TU dan SPM TU</td> </tr> </table>	Nama SOP	:	Pengajuan SPP TU dan SPM TU												
Nama SOP	:	Pengajuan SPP TU dan SPM TU														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="background-color: #f2f2f2;">Dasar Hukum</td> </tr> <tr> <td> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. Undang-Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 3. Undang-Undang No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 4. Undang-Undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 5. Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. 6. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dimana Kewenangan dibidang Energi dan Sumber Daya Mineral menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Provinsi 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Th.2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Th.2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 10. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 14. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No 2 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 15. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No 27 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No 80 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan sosial. 16. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 69 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 </td> </tr> </table>	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. Undang-Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 3. Undang-Undang No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 4. Undang-Undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 5. Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. 6. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dimana Kewenangan dibidang Energi dan Sumber Daya Mineral menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Provinsi 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Th.2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Th.2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 10. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 14. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No 2 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 15. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No 27 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No 80 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan sosial. 16. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 69 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="background-color: #f2f2f2;">Kualifikasi Pelaksana</td> </tr> <tr> <td> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami aplikasi SIMDA 2. Mengetahui dan mengerti DPA 3. Memahami Proses dan Prosedur Pengajuan SPP TU dan SPM TU </td> </tr> </table>	Kualifikasi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami aplikasi SIMDA 2. Mengetahui dan mengerti DPA 3. Memahami Proses dan Prosedur Pengajuan SPP TU dan SPM TU 											
Dasar Hukum																
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. Undang-Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 3. Undang-Undang No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 4. Undang-Undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 5. Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. 6. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dimana Kewenangan dibidang Energi dan Sumber Daya Mineral menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Provinsi 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Th.2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Th.2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 10. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 14. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No 2 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 15. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No 27 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No 80 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan sosial. 16. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 69 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 																
Kualifikasi Pelaksana																
<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami aplikasi SIMDA 2. Mengetahui dan mengerti DPA 3. Memahami Proses dan Prosedur Pengajuan SPP TU dan SPM TU 																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="background-color: #f2f2f2;">Keterkaitan SOP</td> </tr> <tr> <td> </td> </tr> </table>	Keterkaitan SOP		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="background-color: #f2f2f2;">Peralatan/ Perlengkapan</td> </tr> <tr> <td> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lembar Kontrol / Lembar Verifikasi Pengajuan SPP TU dan SPM TU 2. SPTJB 3. DPA yang telah disahkan 4. Dokumen SPJ 5. SK SPD </td> </tr> </table>	Peralatan/ Perlengkapan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lembar Kontrol / Lembar Verifikasi Pengajuan SPP TU dan SPM TU 2. SPTJB 3. DPA yang telah disahkan 4. Dokumen SPJ 5. SK SPD 											
Keterkaitan SOP																
Peralatan/ Perlengkapan																
<ol style="list-style-type: none"> 1. Lembar Kontrol / Lembar Verifikasi Pengajuan SPP TU dan SPM TU 2. SPTJB 3. DPA yang telah disahkan 4. Dokumen SPJ 5. SK SPD 																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="background-color: #f2f2f2;">Peringatan</td> </tr> <tr> <td> <ol style="list-style-type: none"> 1. Proses pengajuan SPP TU dan SPM TU berpengaruh pada ketersediaan kas DCKTK 2. Pelaksanaan kegiatan menunggu kesiapan dana pada rekening bendahara </td> </tr> </table>	Peringatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proses pengajuan SPP TU dan SPM TU berpengaruh pada ketersediaan kas DCKTK 2. Pelaksanaan kegiatan menunggu kesiapan dana pada rekening bendahara 	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="background-color: #f2f2f2;">Pencatatan & Pendataan</td> </tr> <tr> <td>Rencana Kebutuhan Keuangan</td> </tr> </table>	Pencatatan & Pendataan	Rencana Kebutuhan Keuangan											
Peringatan																
<ol style="list-style-type: none"> 1. Proses pengajuan SPP TU dan SPM TU berpengaruh pada ketersediaan kas DCKTK 2. Pelaksanaan kegiatan menunggu kesiapan dana pada rekening bendahara 																
Pencatatan & Pendataan																
Rencana Kebutuhan Keuangan																

 PEMERINTAHAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	Nomor SOP	:	
	Tanggal Pembuatan	:	Januari 2018
	Tanggal Revisi	:	
	Tanggal Pengesahan	:	Januari 2018
	Disahkan oleh	:	KEPALA DINAS, ERMAL SUBHAN, ST, MT Pembina Tingkat I NIP. 19690206 199603 1 003
Sub. Bagian Keuangan dan Aset	Nama SOP	:	Penyusunan Laporan Jawaban Hasil Pemeriksaan
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana		
1. Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. Undang-Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 3. Undang-Undang No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 4. Undang-Undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 5. Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. 6. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dimana Kewenangan dibidang Energi dan Sumber Daya Mineral menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Provinsi 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Th.2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Th.2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 10. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 14. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No 2 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 15. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No 27 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No 80 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan sosial. 16. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 69 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016	1. Memahami SAP 2. Mengetahui dan memahami hasil pemeriksaan 3. Mampu menyusun laporan jawaban hasil pemeriksaan		
Keterkaitan SOP	Peralatan/ Perlengkapan		
1 SOP Surat Masuk Ke Kasub.bag.Keuangan	LHP Instansi Terkait		
Peringatan	Pencatatan & Pendataan		
Apabila tidak dilakukan penyusunan Laporan Jawaban Hasil Pemeriksaan maka akan berpengaruh pada opini kinerja Pemerintah Kota	Rencana Kebutuhan Keuangan		

 PEMERINTAHAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Nomor SOP</td> <td style="width: 5%;">:</td> <td style="width: 75%;"></td> </tr> <tr> <td>Tanggal Pembuatan</td> <td>:</td> <td>Januari 2018</td> </tr> <tr> <td>Tanggal Revisi</td> <td>:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tanggal Pengesahan</td> <td>:</td> <td>Januari 2018</td> </tr> <tr> <td>Disahkan oleh</td> <td>:</td> <td style="text-align: center;"> KEPALA DINAS, ERMAL SUBHAN, ST, MT Pembina Tingkat I NIP. 19690206 199603 1 003 </td> </tr> </table>	Nomor SOP	:		Tanggal Pembuatan	:	Januari 2018	Tanggal Revisi	:		Tanggal Pengesahan	:	Januari 2018	Disahkan oleh	:	KEPALA DINAS, ERMAL SUBHAN, ST, MT Pembina Tingkat I NIP. 19690206 199603 1 003
Nomor SOP	:															
Tanggal Pembuatan	:	Januari 2018														
Tanggal Revisi	:															
Tanggal Pengesahan	:	Januari 2018														
Disahkan oleh	:	KEPALA DINAS, ERMAL SUBHAN, ST, MT Pembina Tingkat I NIP. 19690206 199603 1 003														
Sub. Bagian Keuangan dan Aset	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Nama SOP</td> <td style="width: 5%;">:</td> <td style="width: 75%;">Pengajuan SPPD</td> </tr> </table>	Nama SOP	:	Pengajuan SPPD												
Nama SOP	:	Pengajuan SPPD														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="background-color: #f2f2f2;">Dasar Hukum</td> </tr> <tr> <td> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. Undang-Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 3. Undang-Undang No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 4. Undang-Undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 5. Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. 6. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dimana Kewenangan dibidang Energi dan Sumber Daya Mineral menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Provinsi 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Th.2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Th.2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 10. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 14. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No 2 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 15. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No 27 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No 80 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan sosial. 16. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 69 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 </td> </tr> </table>	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. Undang-Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 3. Undang-Undang No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 4. Undang-Undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 5. Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. 6. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dimana Kewenangan dibidang Energi dan Sumber Daya Mineral menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Provinsi 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Th.2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Th.2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 10. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 14. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No 2 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 15. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No 27 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No 80 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan sosial. 16. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 69 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="background-color: #f2f2f2;">Kualifikasi Pelaksana</td> </tr> <tr> <td> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki pengetahuan pengelolaan anggaran 2. Memiliki pengetahuan mekanisme pengelolaan SPPD 3. Memiliki keahlian penataan pengajuan SPPD 4. Memiliki keahlian perencanaan pengajuan SPPD </td> </tr> </table>	Kualifikasi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki pengetahuan pengelolaan anggaran 2. Memiliki pengetahuan mekanisme pengelolaan SPPD 3. Memiliki keahlian penataan pengajuan SPPD 4. Memiliki keahlian perencanaan pengajuan SPPD 											
Dasar Hukum																
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. Undang-Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 3. Undang-Undang No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 4. Undang-Undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 5. Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. 6. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dimana Kewenangan dibidang Energi dan Sumber Daya Mineral menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Provinsi 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Th.2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Th.2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 10. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 14. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No 2 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 15. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No 27 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No 80 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan sosial. 16. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 69 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 																
Kualifikasi Pelaksana																
<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki pengetahuan pengelolaan anggaran 2. Memiliki pengetahuan mekanisme pengelolaan SPPD 3. Memiliki keahlian penataan pengajuan SPPD 4. Memiliki keahlian perencanaan pengajuan SPPD 																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="background-color: #f2f2f2;">Keterkaitan SOP</td> </tr> <tr> <td></td> </tr> </table>	Keterkaitan SOP		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="background-color: #f2f2f2;">Peralatan/ Perlengkapan</td> </tr> <tr> <td> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lembar Kontrol / Lembar Verifikasi Pengajuan GU 2. SP/TJB 3. DPA yang telah disahkan 4. Dokumen SPJ 5. SK SPD </td> </tr> </table>	Peralatan/ Perlengkapan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lembar Kontrol / Lembar Verifikasi Pengajuan GU 2. SP/TJB 3. DPA yang telah disahkan 4. Dokumen SPJ 5. SK SPD 											
Keterkaitan SOP																
Peralatan/ Perlengkapan																
<ol style="list-style-type: none"> 1. Lembar Kontrol / Lembar Verifikasi Pengajuan GU 2. SP/TJB 3. DPA yang telah disahkan 4. Dokumen SPJ 5. SK SPD 																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="background-color: #f2f2f2;">Peringatan</td> </tr> <tr> <td> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengajuan SPPD berpengaruh pada Ketersediaan Kas DCKTK 2. Pelaksanaan kegiatan menunggu kesiapan dana pada rekening bendahara </td> </tr> </table>	Peringatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengajuan SPPD berpengaruh pada Ketersediaan Kas DCKTK 2. Pelaksanaan kegiatan menunggu kesiapan dana pada rekening bendahara 	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="background-color: #f2f2f2;">Pencatatan & Pendataan</td> </tr> <tr> <td>Rencana Kebutuhan Keuangan</td> </tr> </table>	Pencatatan & Pendataan	Rencana Kebutuhan Keuangan											
Peringatan																
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengajuan SPPD berpengaruh pada Ketersediaan Kas DCKTK 2. Pelaksanaan kegiatan menunggu kesiapan dana pada rekening bendahara 																
Pencatatan & Pendataan																
Rencana Kebutuhan Keuangan																



**PEMERINTAHAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

Sub. Bagian Keuangan dan Aset

Dasar Hukum

1. Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. Undang-Undang No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
4. Undang-Undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
5. Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
6. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dimana Kewenangan dibidang Energi dan Sumber Daya Mineral menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Provinsi
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Th.2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Th.2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
10. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
14. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No 2 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
15. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No 27 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No 80 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan sosial.
16. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 69 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016

Keterkaitan SOP

Peringatan

1. Pengajuan SPPD berpengaruh pada Ketersediaan Kas DCKTK
2. Pelaksanaan kegiatan menunggu kesiapan dana pada rekening bendahara

Nomor SOP	:	
Tanggal Pembuatan	:	Januari 2018
Tanggal Revisi	:	
Tanggal Pengesahan	:	Januari 2018
Disahkan oleh	:	KEPALA DINAS, ERMAL SUBHAN, ST, MT Pembina Tingkat I NIP. 19690206 199603 1 003
Nama SOP	:	Pengajuan SPP - GU SPM - GU Nihil

Kualifikasi Pelaksana

1. Memahami aplikasi SIMDA
2. Mengetahui dan mengerti DPA
3. Memahami Proses dan Prosedur Pengajuan SPP GU dan SPM - GU

Peralatan/ Perlengkapan

1. Lembar Kontrol / Lembar Verifikasi Pengajuan GU
2. SPTJB
3. DPA yang telah disahkan
4. Dokumen SPJ
5. SK SPD

Pencatatan & Pendataan

Rencana Kebutuhan Keuangan

 PEMERINTAHAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Nomor SOP</td> <td style="width: 5%;">:</td> <td style="width: 75%;"></td> </tr> <tr> <td>Tanggal Pembuatan</td> <td>:</td> <td>Januari 2018</td> </tr> <tr> <td>Tanggal Revisi</td> <td>:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tanggal Pengesahan</td> <td>:</td> <td>Januari 2018</td> </tr> <tr> <td>Disahkan oleh</td> <td>:</td> <td style="text-align: center;"> KEPALA DINAS, ERMAL SUBHAN, ST, MT Pembina Tingkat I NIP. 19690206 199603 1 003 </td> </tr> </table>	Nomor SOP	:		Tanggal Pembuatan	:	Januari 2018	Tanggal Revisi	:		Tanggal Pengesahan	:	Januari 2018	Disahkan oleh	:	KEPALA DINAS, ERMAL SUBHAN, ST, MT Pembina Tingkat I NIP. 19690206 199603 1 003
Nomor SOP	:															
Tanggal Pembuatan	:	Januari 2018														
Tanggal Revisi	:															
Tanggal Pengesahan	:	Januari 2018														
Disahkan oleh	:	KEPALA DINAS, ERMAL SUBHAN, ST, MT Pembina Tingkat I NIP. 19690206 199603 1 003														
Sub. Bagian Keuangan dan Aset	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Nama SOP</td> <td style="width: 5%;">:</td> <td style="width: 75%;">Penyusunan Buku Pertanggungjawaban Pajak</td> </tr> </table>	Nama SOP	:	Penyusunan Buku Pertanggungjawaban Pajak												
Nama SOP	:	Penyusunan Buku Pertanggungjawaban Pajak														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="background-color: black; color: white;">Dasar Hukum</td> </tr> <tr> <td> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. Undang-Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 3. Undang-Undang No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 4. Undang-Undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 5. Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. 6. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dimana Kewenangan dibidang Energi dan Sumber Daya Mineral menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Provinsi 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Th.2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Th.2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 10. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 14. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No 2 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 15. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No 27 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No 80 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan sosial. 16. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 69 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 </td> </tr> </table>	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. Undang-Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 3. Undang-Undang No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 4. Undang-Undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 5. Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. 6. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dimana Kewenangan dibidang Energi dan Sumber Daya Mineral menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Provinsi 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Th.2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Th.2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 10. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 14. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No 2 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 15. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No 27 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No 80 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan sosial. 16. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 69 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="background-color: black; color: white;">Kualifikasi Pelaksana</td> </tr> <tr> <td> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami aplikasi SIMDA 2. Mengetahui dan mengerti DPA 3. Memahami Proses dan Prosedur Pengajuan SPP GU dan SPM - GU </td> </tr> </table>	Kualifikasi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami aplikasi SIMDA 2. Mengetahui dan mengerti DPA 3. Memahami Proses dan Prosedur Pengajuan SPP GU dan SPM - GU 											
Dasar Hukum																
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. Undang-Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 3. Undang-Undang No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 4. Undang-Undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 5. Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. 6. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dimana Kewenangan dibidang Energi dan Sumber Daya Mineral menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Provinsi 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Th.2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Th.2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 10. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 14. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No 2 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 15. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No 27 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No 80 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan sosial. 16. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 69 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 																
Kualifikasi Pelaksana																
<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami aplikasi SIMDA 2. Mengetahui dan mengerti DPA 3. Memahami Proses dan Prosedur Pengajuan SPP GU dan SPM - GU 																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="background-color: black; color: white;">Keterkaitan SOP</td> </tr> <tr> <td style="height: 50px;"></td> </tr> </table>	Keterkaitan SOP		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="background-color: black; color: white;">Peralatan/ Perlengkapan</td> </tr> <tr> <td> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lembar Kontrol / Lembar Verifikasi Pengajuan GU 2. SPTJB 3. DPA yang telah disahkan 4. Dokumen SPJ 5. SK SPD </td> </tr> </table>	Peralatan/ Perlengkapan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lembar Kontrol / Lembar Verifikasi Pengajuan GU 2. SPTJB 3. DPA yang telah disahkan 4. Dokumen SPJ 5. SK SPD 											
Keterkaitan SOP																
Peralatan/ Perlengkapan																
<ol style="list-style-type: none"> 1. Lembar Kontrol / Lembar Verifikasi Pengajuan GU 2. SPTJB 3. DPA yang telah disahkan 4. Dokumen SPJ 5. SK SPD 																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="background-color: black; color: white;">Peringatan</td> </tr> <tr> <td> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengajuan SPPD berpengaruh pada Ketersediaan Kas DCKTK 2. Pelaksanaan kegiatan menunggu kesiapan dana pada rekening bendahara </td> </tr> </table>	Peringatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengajuan SPPD berpengaruh pada Ketersediaan Kas DCKTK 2. Pelaksanaan kegiatan menunggu kesiapan dana pada rekening bendahara 	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="background-color: black; color: white;">Pencatatan & Pendataan</td> </tr> <tr> <td>Rencana Kebutuhan Keuangan</td> </tr> </table>	Pencatatan & Pendataan	Rencana Kebutuhan Keuangan											
Peringatan																
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengajuan SPPD berpengaruh pada Ketersediaan Kas DCKTK 2. Pelaksanaan kegiatan menunggu kesiapan dana pada rekening bendahara 																
Pencatatan & Pendataan																
Rencana Kebutuhan Keuangan																



**PEMERINTAHAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

Sub. Bagian Keuangan dan Aset

Dasar Hukum

1. Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. Undang-Undang No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
4. Undang-Undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
5. Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
6. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dimana Kewenangan dibidang Energi dan Sumber Daya Mineral menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Provinsi
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Th.2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
9. Peraturan Menti Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Th.2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
10. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
14. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No 2 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
15. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No 27 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No 80 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan sosial.
16. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 69 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016

Keterkaitan SOP

Peringatan

Jika salah satu tahapan tidak dilaksanakan, maka pemrosesan permintaan Barang tidak dapat dilaksanakan

Nomor SOP	:	
Tanggal Pembuatan	:	Januari 2018
Tanggal Revisi	:	
Tanggal Pengesahan	:	Januari 2018
Disahkan oleh	:	KEPALA DINAS, ERMAL SUBHAN, ST, MT Pembina Tingkat I NIP. 19690206 199603 1 003
Nama SOP	:	Permintaan Barang

Kualifikasi Pelaksana

1. Mengetahui dan Memahami tentang Pengelolaan BMD

Peralatan/ Perlengkapan

1. Formulir perminataan barang
2. Check list kesesuaian barang

Pencatatan & Pendataan

 PEMERINTAHAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Nomor SOP</td> <td style="width: 10%;">:</td> <td style="width: 60%;"></td> </tr> <tr> <td>Tanggal Pembuatan</td> <td>:</td> <td>Januari 2018</td> </tr> <tr> <td>Tanggal Revisi</td> <td>:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tanggal Pengesahan</td> <td>:</td> <td>Januari 2018</td> </tr> <tr> <td>Disahkan oleh</td> <td>:</td> <td style="text-align: center;">KEPALA DINAS, ERMAL SUBHAN, ST, MT Pembina Tingkat I NIP. 19690206 199603 1 003</td> </tr> </table>	Nomor SOP	:		Tanggal Pembuatan	:	Januari 2018	Tanggal Revisi	:		Tanggal Pengesahan	:	Januari 2018	Disahkan oleh	:	KEPALA DINAS, ERMAL SUBHAN, ST, MT Pembina Tingkat I NIP. 19690206 199603 1 003
Nomor SOP	:															
Tanggal Pembuatan	:	Januari 2018														
Tanggal Revisi	:															
Tanggal Pengesahan	:	Januari 2018														
Disahkan oleh	:	KEPALA DINAS, ERMAL SUBHAN, ST, MT Pembina Tingkat I NIP. 19690206 199603 1 003														
Sub. Bagian Keuangan dan Aset	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Nama SOP</td> <td style="width: 10%;">:</td> <td style="width: 60%;">Pengelolaan Kartu Inventaris</td> </tr> </table>	Nama SOP	:	Pengelolaan Kartu Inventaris												
Nama SOP	:	Pengelolaan Kartu Inventaris														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 100%;">Dasar Hukum</td> </tr> <tr> <td> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. Undang-Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 3. Undang-Undang No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 4. Undang-Undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 5. Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. 6. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dimana Kewenangan dibidang Energi dan Sumber Daya Mineral menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Provinsi 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Th.2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Th.2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 10. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 14. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No 2 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 15. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No 27 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No 80 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan sosial. 16. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 69 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 </td> </tr> </table>	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. Undang-Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 3. Undang-Undang No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 4. Undang-Undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 5. Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. 6. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dimana Kewenangan dibidang Energi dan Sumber Daya Mineral menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Provinsi 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Th.2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Th.2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 10. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 14. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No 2 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 15. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No 27 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No 80 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan sosial. 16. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 69 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 100%;">Kualifikasi Pelaksana</td> </tr> <tr> <td> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui dan Memahami tentang Pengelolaan BMD 2. Memiliki keahlian pengelolaan inventaris barang </td> </tr> </table>	Kualifikasi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui dan Memahami tentang Pengelolaan BMD 2. Memiliki keahlian pengelolaan inventaris barang 											
Dasar Hukum																
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. Undang-Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 3. Undang-Undang No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 4. Undang-Undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 5. Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. 6. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dimana Kewenangan dibidang Energi dan Sumber Daya Mineral menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Provinsi 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Th.2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Th.2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 10. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 14. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No 2 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 15. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No 27 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No 80 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan sosial. 16. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 69 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 																
Kualifikasi Pelaksana																
<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui dan Memahami tentang Pengelolaan BMD 2. Memiliki keahlian pengelolaan inventaris barang 																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 100%;">Keterkaitan SOP</td> </tr> <tr> <td> <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Permintaan Barang </td> </tr> </table>	Keterkaitan SOP	<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Permintaan Barang 	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 100%;">Peralatan/ Perlengkapan</td> </tr> <tr> <td> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat permintaan kebutuhan BMD 2. Check list kesesuaian BMD </td> </tr> </table>	Peralatan/ Perlengkapan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat permintaan kebutuhan BMD 2. Check list kesesuaian BMD 											
Keterkaitan SOP																
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Permintaan Barang 																
Peralatan/ Perlengkapan																
<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat permintaan kebutuhan BMD 2. Check list kesesuaian BMD 																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 100%;">Peringatan</td> </tr> <tr> <td>Jika terdapat ketidaksesuaian Inventaris BMD maka KIR perlu di perbaiki</td> </tr> </table>	Peringatan	Jika terdapat ketidaksesuaian Inventaris BMD maka KIR perlu di perbaiki	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 100%;">Pencatatan & Pendataan</td> </tr> <tr> <td></td> </tr> </table>	Pencatatan & Pendataan												
Peringatan																
Jika terdapat ketidaksesuaian Inventaris BMD maka KIR perlu di perbaiki																
Pencatatan & Pendataan																

 PEMERINTAHAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Nomor SOP</td> <td style="width: 10%;">:</td> <td style="width: 60%;"></td> </tr> <tr> <td>Tanggal Pembuatan</td> <td>:</td> <td>Januari 2018</td> </tr> <tr> <td>Tanggal Revisi</td> <td>:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tanggal Pengesahan</td> <td>:</td> <td>Januari 2018</td> </tr> <tr> <td>Disahkan oleh</td> <td>:</td> <td style="text-align: center;"> KEPALA DINAS, ERMAL SUBHAN, ST, MT Pembina Tingkat I NIP. 19690206 199603 1 003 </td> </tr> </table>	Nomor SOP	:		Tanggal Pembuatan	:	Januari 2018	Tanggal Revisi	:		Tanggal Pengesahan	:	Januari 2018	Disahkan oleh	:	KEPALA DINAS, ERMAL SUBHAN, ST, MT Pembina Tingkat I NIP. 19690206 199603 1 003
Nomor SOP	:															
Tanggal Pembuatan	:	Januari 2018														
Tanggal Revisi	:															
Tanggal Pengesahan	:	Januari 2018														
Disahkan oleh	:	KEPALA DINAS, ERMAL SUBHAN, ST, MT Pembina Tingkat I NIP. 19690206 199603 1 003														
Sub. Bagian Keuangan dan Aset	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Nama SOP</td> <td style="width: 10%;">:</td> <td style="width: 60%;">Penghapusan Barang</td> </tr> </table>	Nama SOP	:	Penghapusan Barang												
Nama SOP	:	Penghapusan Barang														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="background-color: #f2f2f2;">Dasar Hukum</td> </tr> <tr> <td> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. Undang-Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 3. Undang-Undang No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 4. Undang-Undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 5. Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. 6. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dimana Kewenangan dibidang Energi dan Sumber Daya Mineral menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Provinsi 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Th.2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Th.2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 10. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 14. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No 2 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 15. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No 27 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No 80 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan sosial. 16. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 69 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 </td> </tr> <tr> <td style="background-color: #f2f2f2;">Keterkaitan SOP</td> </tr> <tr> <td> <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Inventaris Barang </td> </tr> </table>	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. Undang-Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 3. Undang-Undang No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 4. Undang-Undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 5. Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. 6. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dimana Kewenangan dibidang Energi dan Sumber Daya Mineral menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Provinsi 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Th.2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Th.2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 10. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 14. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No 2 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 15. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No 27 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No 80 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan sosial. 16. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 69 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 	Keterkaitan SOP	<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Inventaris Barang 	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="background-color: #f2f2f2;">Kualifikasi Pelaksana</td> </tr> <tr> <td> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui dan Memahami tentang Pengelolaan BMD </td> </tr> <tr> <td style="background-color: #f2f2f2;">Peralatan/ Perlengkapan</td> </tr> <tr> <td> <ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir permintaan barang 2. Check list usulan penghapusan BMD 3. BA Penghapusan BMD </td> </tr> <tr> <td style="background-color: #f2f2f2;">Pencatatan & Pendataan</td> </tr> <tr> <td></td> </tr> </table>	Kualifikasi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui dan Memahami tentang Pengelolaan BMD 	Peralatan/ Perlengkapan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir permintaan barang 2. Check list usulan penghapusan BMD 3. BA Penghapusan BMD 	Pencatatan & Pendataan						
Dasar Hukum																
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. Undang-Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 3. Undang-Undang No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 4. Undang-Undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 5. Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. 6. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dimana Kewenangan dibidang Energi dan Sumber Daya Mineral menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Provinsi 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Th.2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Th.2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 10. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 14. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No 2 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 15. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No 27 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No 80 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan sosial. 16. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 69 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 																
Keterkaitan SOP																
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Inventaris Barang 																
Kualifikasi Pelaksana																
<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui dan Memahami tentang Pengelolaan BMD 																
Peralatan/ Perlengkapan																
<ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir permintaan barang 2. Check list usulan penghapusan BMD 3. BA Penghapusan BMD 																
Pencatatan & Pendataan																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="background-color: #f2f2f2;">Peringatan</td> </tr> <tr> <td>Jika salah satu tahapan tidak dilaksanakan, maka pemrosesan penghapusan Barang tidak dapat dilaksanakan</td> </tr> </table>	Peringatan	Jika salah satu tahapan tidak dilaksanakan, maka pemrosesan penghapusan Barang tidak dapat dilaksanakan														
Peringatan																
Jika salah satu tahapan tidak dilaksanakan, maka pemrosesan penghapusan Barang tidak dapat dilaksanakan																

Sop Laporan Bulanan Keuangan Bulanan, Triwulan dan Semesteran

No.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			Keterangan
		Bendahara Pengeluaran	PPK - SKPD	Sekretaris	PA	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menyiapkan data dan informasi yang berkaitan dengan laporan keuangan					BKU, SPJ Bend. Pengeluaran, Pajak, Penutupan, pemeriksaan dan rekonsiliasi Kas, serta Realisasi Keuangan.	3 Hari	BKU, SPJ Bend. Pengeluaran, Pajak, Penutupan, pemeriksaan dan rekonsiliasi Kas, serta Realisasi Keuangan.	
2	Menyusun dan memaraf draft laporan keuangan bulanan/ triwulan/semester					BKU, SPJ Bend. Pengeluaran, Pajak, Penutupan, pemeriksaan dan rekonsiliasi Kas, serta Realisasi Keuangan.	4 Hari	Draft laporan keuangan	
3	Memeriksa dan memaraf draft laporan keuangan					Draft laporan keuangan	2 Jam	Draft laporan keuangan yang telah diperiksa dan diparaf PPK	
4	Memeriksa dan memaraf draf laporan keuangan					Draft laporan keuangan yang telah diperiksa dan diparaf PPK	5 Menit	Draft laporan keuangan yang telah diperiksa dan diparaf Sekretaris	
5	Menyempurnakan laporan keuangan dan menyerahkan kepada PA untuk di tandatangani laporan					Draft laporan keuangan yang telah diperiksa dan diparaf Sekretaris	10 menit	Laporan keuangan final	
6	Menerima dan menandatangani laporan keuangan					Laporan keuangan final	5 Menit	Laporan Keuangan final yang sudah ditandatangani PA	

Palangkaraya, Januari 2018

Mengetahui :
 KEPALA DINAS ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
 PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

ERMAL SUBHAN, ST, MT
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19690206 199603 1 003

Sop Laporan Keuangan Tahunan

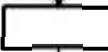
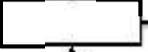
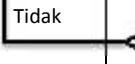
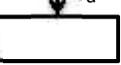
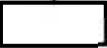
No.	KEGIATAN	PELAKSANA		MUTU BAKU			KET	
		PPK - SKPD	PA	Kelengkapan	Waktu	Output		
1	Membuat nota dinas permintaan data dan mendistribusikan kepada KPA, bendahara pengeluaran, pengurus barang, dan penyimpan barang	<pre> graph TD Start([Start]) --> Process[] Process --> Decision{ } Decision -- Tidak --> Process Decision -- Ya --> End([End]) </pre>		Nota dinas permintaan data	30 menit	Nota dinas permintaan data		
2	Menerima data dari bendahara pengeluaran, pengurus barang, dan penyimpan barang				Nota dinas permintaan data, form check list	30 Menit	BKU, Neraca, Calk, LRA, SPJ Bend. Pengeluaran, Penutupan Kas, Pemeriksaan Kas., Rekening Koran, Rekonsiliasi Kas, KIB, Kewajiban kepada pihak Ketiga, Data pembayaran dimuka, Rekonsiliasi Keuangan dan barang dan stock ofname	
3	Menyusun laporan akhir tahun				BKU, Neraca, Calk, LRA, SPJ Bend. Pengeluaran, Penutupan Kas, Pemeriksaan Kas., Rekening Koran, Rekonsiliasi Kas, KIB, Kewajiban kepada pihak Ketiga, Data pembayaran dimuka, Rekonsiliasi Keuangan dan barang dan stock ofname	2 minggu	Draft laporan keuangan	
4	Memverifikasi dan menandatangani laporan keuangan tahunan				Draft laporan keuangan	30 jam	laporan keuangan final	
5	Menyerahkan laporan keuangan tahunan kepada BPKAD dan Inspektorat				laporan keuangan final	1 Jam	Tanda Terima Laporan keuangan	

Palangkaraya, Januari 2018

Mengetahui :
 KEPALA DINAS ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
 PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

ERMAL SUBHAN, ST, MT
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19690206 199603 1 003

Sop SPP SPM UP

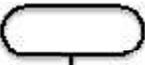
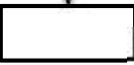
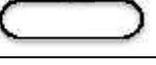
No.	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			Keterangan
		PA / KPA	Bendahara Pengeluaran	PPK - SKPD	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menyerahkan SPD kepada Bendahara Pengeluaran				SPD	5 Menit	SPD yang sudah diserahkan	
2	Menerima SPD, membuat dan mendatangani SPP UP				SPD, Buku Register, Surat Pengantar, Rincian, Ringkasan, Surat Pernyataan PA / KPA dan Dokumen Lainnya	30 Menit	SPP - UP	
3	Menyerahkan SPP UP kepada PPK untuk di Verifikasi dan di paraf				SPP - UP	5 Menit	SPP - UP yang sudah diserahkan kepada PPK - SKPD	
4	Menerima dan Memverifikasi SPP UP, jika ada kesalahan maka dikembalikan kepada BP untuk diperbaiki dan jika benar diparaf dan ditindak lanjuti.				SPP - UP yang sudah diserahkan kepada PPK - SKPD	20 Menit	SPP - UP yang sudah diverifikasi dan di paraf PPK	
5	Membuat dan memberikan Paraf SPM UP dan menyerahkan kepada PA / KPA untuk diotorisasi.				SPP - UP yang sudah diverifikasi dan di paraf PPK - SKPD	15 Menit	SPM - UP yang sudah diparaf PPK - SKPD	
6	Menandatangani SPM - UP				SPM - UP yang sudah diparaf PPK - SKPD	5 Menit	SPM - UP yang sudah ditandatangani PA / KPA	
7	Menyerahkan SPP UP, SPM-UP kepada BUD				SPM - UP yang sudah ditandatangani PA / KPA	15 Menit	SPP - UP dan SPM - UP yang sudah diserahkan kepada BUD	

Palangkaraya, Januari 2018

Mengetahui :
 KEPALA DINAS ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
 PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

ERMAL SUBHAN, ST, MT
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19690206 199603 1 003

Sop SPP SPM GU

No.	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			Keterangan
		PA / KPA	Bendahara Pengeluaran	PPK - SKPD	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menyerahkan SPJ kepada Bendahara Pengeluaran				SPJ	5 Menit	SPJ yang sudah diserahkan	
2	Menerima SPJ, membuat dan mendatangi SPP GU				SPJ, Buku Register, Surat Pengantar, Rincian, Ringkasan, Surat Pernyataan PA / KPA dan Dokumen Lainnya	10 Menit	SPP - GU	
3	Menyerahkan SPP GU kepada PPK untuk di Verifikasi dan di paraf				SPP - GU	5 Menit	SPP - GU yang sudah diserahkan kepada PPK - SKPD	
4	Menerima dan Memverifikasi SPP GU, jika ada kesalahan maka dikembalikan kepada BP untuk diperbaiki dan jika benar diparaf dan ditindak lanjuti.				SPP - GU yang sudah diserahkan kepada PPK - SKPD	20 Menit	SPP - GU yang sudah diverifikasi dan di paraf PPK	
5	Membuat dan memberikan Paraf SPM GU dan menyerahkan kepada PA / KPA untuk diotorisasi.				SPP - GU yang sudah diverifikasi dan di paraf PPK - SKPD	15 Menit	SPM - GU yang sudah diparaf PPK - SKPD	
6	Menandatangani SPM - GU				SPM - GU yang sudah diparaf PPK - SKPD	5 Menit	SPM - GU yang sudah ditandatangani PA / KPA	
7	Menyerahkan SPP GU, SPM-GU kepada BUD				SPM - GU yang sudah ditandatangani PA / KPA	15 Menit	SPP - GU dan SPM - GU yang sudah diserahkan kepada BUD	

Palangkaraya, Januari 2018

Mengetahui :
 KEPALA DINAS ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
 PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

ERMAL SUBHAN, ST, MT
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19690206 199603 1 003

Sop SPM LS Gaji

No.	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			Keterangan
		PA	Bendahara Pengeluaran	PPK - SKPD	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menyerahkan SPD kepada Bendahara Pengeluaran				SPD	5 Menit	SPD yang sudah diserahkan	
2	Menerima SPD, membuat dan mendatangi SPP LS - Gaji				SPD, Buku Register, Surat Pengantar, Daftar Gaji, Surat Bukti Dinas, Rincian, Ringkasan, Surat Pernyataan PA / KPA dan Dokumen Lainnya	30 Menit	SPP - LS Gaji	
3	Menyerahkan SPP LS Gaji kepada PPK untuk di Verifikasi dan di paraf				SPP - LS Gaji	5 Menit	SPP - LS Gaji yang sudah diserahkan kepada PPK - SKPD	
4	Menerima dan Memverifikasi SPP LS Gaji, jika ada kesalahan maka dikembalikan kepada BP untuk diperbaiki dan jika benar diparaf dan ditindak lanjuti.				SPP - LS Gaji yang sudah diserahkan kepada PPK - SKPD	20 Menit	SPP - LS Gaji yang sudah diverifikasi dan di paraf PPK	
5	Membuat dan memberikan Paraf SPM UP dan menyerahkan kepada PA untuk diotorisasi.				SPP - LS Gaji yang sudah diverifikasi dan di paraf PPK - SKPD	15 Menit	SPM - LS Gaji yang sudah diparaf PPK - SKPD	
6	Menandatangani SPM - LS Gaji				SPM - LS Gaji yang sudah diparaf PPK - SKPD	5 Menit	SPM - LS Gaji yang sudah ditandatangani PA	
7	Menyerahkan SPP LS Gaji, SPM-LS Gaji kepada BUD				SPM - LS Gaji yang sudah ditandatangani PA	15 Menit	SPP - LS Gaji dan SPM - LS Gaji yang sudah diserahkan kepada BUD	

Palangkaraya, Januari 2018

Mengetahui :
KEPALA DINAS ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

ERMAL SUBHAN, ST, MT
Pembina Tingkat I
NIP. 19690206 199603 1 003

No.	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			KET
		PA / KPA	Bendahara Pengeluaran	PPK - SKPD	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menyerahkan SPD kepada Bendahara Pengeluaran				SPD	5 Menit	SPD yang sudah diserahkan	
2	Menerima SPD, membuat dan mendatangi SPP LS - BJ				SPD, Buku Register, Surat Pengantar, Rincian, Ringkasan, Surat Pernyataan PA / KPA dan Dokumen Lainnya	20 Menit	SPP - LS - BJ	
3	Menyerahkan SPP LS - BJ kepada PPK untuk di Verifikasi dan di paraf				SPP - LS - BJ	5 Menit	SPP - LS - BJ yang sudah diserahkan kepada PPK - SKPD	
4	Menerima dan Memverifikasi SPP LS - BJ, jika ada kesalahan maka dikembalikan kepada BP untuk diperbaiki dan jika benar diparaf dan ditindak lanjuti.				SPP - LS - BJ yang sudah diserahkan kepada PPK - SKPD	30 Menit	SPP LS - BJ yang sudah diverifikasi dan di paraf PPK	
5	Membuat dan memberikan Paraf SPM LS - BJ dan menyerahkan kepada PA / KPA untuk diotorisasi.				SPP LS - BJ yang sudah diverifikasi dan di paraf PPK - SKPD	15 Menit	SPM LS - BJ yang sudah diparaf PPK - SKPD	
6	Menandatangani SPM LS - BJ				SPM LS - BJ yang sudah diparaf PPK - SKPD	5 Menit	SPM LS - BJ yang sudah ditandatangani PA / KPA	
7	Menyerahkan SPP LS - BJ, SPM LS - BJ kepada BUD				SPM LS - BJ yang sudah ditandatangani PA / KPA	15 Menit	SPP LS - BJ dan SPM LS - BJ yang sudah diserahkan kepada BUD	

Palangkaraya, Januari 2018

Mengetahui :
 KEPALA DINAS ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
 PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

ERMAL SUBHAN, ST, MT
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19690206 199603 1 003

Sop SPP SPM TU

No.	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			KET
		PA / KPA	Bendahara Pengeluaran	PPK - SKPD	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menyerahkan SPD kepada Bendahara Pengeluaran				SPD	5 Menit	SPD yang sudah diserahkan	
2	Menerima SPD, membuat dan mendatangi SPP TU				SPD, Buku Register, Surat Pengantar, Rincian, Ringkasan, Surat Pernyataan PA / KPA dan Dokumen Lainnya	30 Menit	SPP - TU	
3	Menyerahkan SPP TU kepada PPK - SKPD untuk di Verifikasi dan di paraf				SPP - TU	5 Menit	SPP - TU yang sudah diserahkan kepada PPK - SKPD	
4	Menerima dan Memverifikasi SPP TU, jika ada kesalahan maka dikembalikan kepada BP untuk diperbaiki dan jika benar diparaf dan ditindak lanjuti.				SPP - TU yang sudah diserahkan kepada PPK - SKPD	20 Menit	SPP - TU yang sudah diverifikasi dan di paraf PPK	
5	Membuat dan memberikan Paraf SPM TU dan menyerahkan kepada PA / KPA untuk di torisasi.				SPP - TU yang sudah diverifikasi dan di paraf PPK - SKPD	15 Menit	SPM - TU yang sudah diparaf PPK - SKPD	
6	Menandatangani SPM - TU				SPM - TU yang sudah diparaf PPK - SKPD	5 Menit	SPM - TU yang sudah ditandatangani PA / KPA	
7	Menyerahkan SPP TU, SPM-TU kepada BUD				SPM - TU yang sudah ditandatangani PA / KPA	15 Menit	SPP - TU dan SPM - TU yang sudah diserahkan kepada BUD	

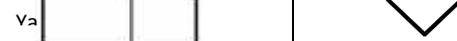
Palangkaraya, Januari 2018

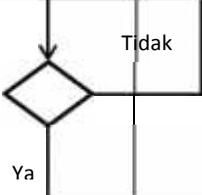
Mengetahui :
 KEPALA DINAS ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
 PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

ERMAL SUBHAN, ST, MT
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19690206 199603 1 003

Sop Penyusunan LHP

No.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KET
		Kepala Dinas	Sekretaris	Kasubbag Keuangan	BP	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menugaskan Sekretaris untuk membuat jawaban hasil pemeriksaan					Surat Masuk dari Inspektorat/BPK	5 menit	Disposisi Kadis	Terkait SOP Surat Masuk
2	Membuat dan mendistribusikan nota dinas ke bidang-bidang terkait, untuk mengumpulkan tanggapan hasil pemeriksaan					Disposisi Kadis	20 menit	Nota dinas	
3	Menerima dan mengkompilasi tanggapan hasil pemeriksaan dari bidang-bidang terkait					Nota dinas	3 jam	Dokumen kompilasi tanggapan hasil pemeriksaan	
4	Menugaskan Kasubbag Keuangan untuk membuat draft/konsep laporan jawaban hasil pemeriksaan					Dokumen kompilasi tanggapan hasil pemeriksaan	5 menit	Disposisi Sekretaris	
5	Menugaskan Bendahara pengeluaran untuk mengumpulkan data terkait hasil pemeriksaan					Disposisi Sekretaris	5 menit	Disposisi Kasubag keuangan	
6	Mengumpulkan data terkait hasil pemeriksaan dan menyerahkan kepada Kasubag Keuangan.					Disposisi Kasubag keuangan	2 hari	Data Keuangan	
7	Membuat draf/konsep laporan jawaban hasil pemeriksaan					Data keuangan dan dokumen rekapitulasi tanggapan hasil pemeriksaan	5 Jam	Draft laporan jawaban hasil pemeriksaan	
8	Mengoreksi dan memberikan paraf terhadap draft/konsep laporan jawaban hasil pemeriksaan. Jika belum sesuai maka dikembalikan kepada Kasubbag Keuangan untuk diperbaiki kembali, jika sudah sesuai ditindaklanjuti.					Draft laporan jawaban hasil pemeriksaan	30 menit	Draft laporan jawaban hasil pemeriksaan yang telah dikoreksi dan diberikan paraf oleh Sekretaris	



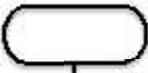
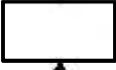
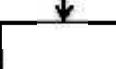
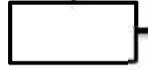
9	Mengoreksi dan menandatangani draft/konsep laporan jawaban hasil pemeriksaan. Jika belum sesuai maka dikembalikan kepada Kasubbag Keuangan untuk diperbaiki kembali, jika sudah sesuai ditindaklanjuti.			Draft laporan jawaban hasil pemeriksaan yang telah dikoreksi dan diberikan paraf oleh Sekretaris	30 menit	Draft laporan jawaban hasil pemeriksaan yang telah dikoreksi dan diberikan paraf oleh Kepala badan	
10	Melakukan penyempurnaan Laporan dan menyampaikan Laporan tersebut ke instansi terkait			Draft laporan jawaban hasil pemeriksaan yang telah dikoreksi dan diberikan paraf oleh Kepala badan	2 Jam	Laporan jawaban hasil pemeriksaan final.	

Palangkaraya, Januari 2018

Mengetahui :
 KEPALA DINAS ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
 PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

ERMAL SUBHAN, ST, MT
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19690206 199603 1 003

Sop Pengajuan SPPD

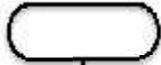
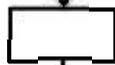
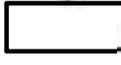
No.	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			KET
		PA / KPA	Bendahara Pengeluaran	PPK - SKPD	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menyerahkan SPJ kepada Bendahara Pengeluaran				SPJ	5 Menit	SPJ yang sudah diserahkan	
2	Menerima SPJ, membuat dan mendatangi SPP GU				SPJ, Buku Register, Surat Pengantar, Rincian, Ringkasan, Surat Pernyataan PA / KPA dan Dokumen Lainnya	10 Menit	SPP - GU	
3	Menyerahkan SPP GU kepada PPK untuk di Verifikasi dan di paraf				SPP - GU	5 Menit	SPP - GU yang sudah diserahkan kepada PPK - SKPD	
4	Menerima dan Memverifikasi SPP GU, jika ada kesalahan maka dikembalikan kepada BP untuk diperbaiki dan jika benar diparaf dan ditindak lanjuti.				SPP - GU yang sudah diserahkan kepada PPK - SKPD	20 Menit	SPP - GU yang sudah diverifikasi dan di paraf PPK	
5	Membuat dan memberikan Paraf SPM GU dan menyerahkan kepada PA / KPA untuk di torisasi.				SPP - GU yang sudah diverifikasi dan di paraf PPK - SKPD	15 Menit	SPM - GU yang sudah diparaf PPK - SKPD	
6	Menandatangani SPM - GU				SPM - GU yang sudah diparaf PPK - SKPD	5 Menit	SPM - GU yang sudah ditandatangani PA / KPA	
7	Menyerahkan SPP GU, SPM-GU kepada BUD				SPM - GU yang sudah ditandatangani PA / KPA	15 Menit	SPP - GU dan SPM - GU yang sudah diserahkan kepada BUD	

Palangkaraya, Januari 2018

Mengetahui :
 KEPALA DINAS ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
 PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

ERMAL SUBHAN, ST, MT
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19690206 199603 1 003

Sop SPP SPM Nihil

No.	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			KET
		PA / KPA	Bendahara Pengeluaran	PPK - SKPD	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menyerahkan SPD kepada Bendahara Pengeluaran				SPD	5 Menit	SPD yang sudah diserahkan	
2	Menerima SPD, membuat dan mendatangi SPP Nihil				SPD, Buku Register, Surat Pengantar, Rincian, Ringkasan, Surat Pernyataan PA / KPA dan Dokumen Lainnya	10 Menit	SPP - Nihil	
3	Menyerahkan SPP Nihil kepada PPK untuk di Verifikasi dan di paraf				SPP - Nihil	5 Menit	SPP - Nihil yang sudah diserahkan kepada PPK - SKPD	
4	Menerima dan Memverifikasi SPP Nihil, jika ada kesalahan maka dikembalikan kepada BP untuk diperbaiki dan jika benar diparaf dan ditindak lanjuti.				SPP - Nihil yang sudah diserahkan kepada PPK - SKPD	15 Menit	SPP - Nihil yang sudah diverifikasi dan di paraf PPK	
5	Membuat dan memberikan Paraf SPM Nihil dan menyerahkan kepada PA / KPA untuk diotorisasi.				SPP - Nihil yang sudah diverifikasi dan di paraf PPK - SKPD	15 Menit	SPM - Nihil yang sudah diparaf PPK - SKPD	
6	Menandatangani SPM - Nihil				SPM - Nihil yang sudah diparaf PPK - SKPD	5 Menit	SPM - Nihil yang sudah ditandatangani PA / KPA	
7	Menyerahkan SPP Nihil, SPM-Nihil kepada BUD				SPM - Nihil yang sudah ditandatangani PA / KPA	15 Menit	SPP - Nihil dan SPM - Nihil yang sudah diserahkan kepada BUD	

Palangkaraya, Januari 2018

Mengetahui :
 KEPALA DINAS ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
 PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

ERMAL SUBHAN, ST, MT
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19690206 199603 1 003

Sop Penyusunan Buku Pajak

No.	KEGIATAN	PELAKSANA		MUTU BAKU			Keterangan
		Bendahara Pengeluaran	PPK - SKPD	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengumpulkan bukti pertanggung jawaban dan menginput ke BKU kedalam aplikasi SIMDA Keuangan	<pre> graph TD Start([Start]) --> Process[Process] Process --> Decision{Decision} Decision -- Tidak --> Process Decision -- Ya --> End([End]) </pre>		Bukti pertanggungjawaban	15 Menit	Bukti pertanggungjawaban	
2	Mencetak Buku Pertanggungjawaban Pajak			Data entry	15 Menit	Buku Pertanggungjawaban Pajak	
3	Memeriksa Buku Pertanggungjawaban Pajak. Jika masih ada yang salah dikembalikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk diperbaiki, jika sudah benar diparaf			Buku Pertanggungjawaban Pajak	60 Menit	Buku Pertanggungjawaban Pajak yang sudah diparaf PPK	
4	Menandatangani Buku Pertanggungjawaban Pajak			Buku Pertanggungjawaban Pajak yang sudah diparaf PPK	10 menit	Buku Pertanggungjawaban Pajak	

Palangkaraya, Januari 2018

Mengetahui :
 KEPALA DINAS ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
 PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

ERMAL SUBHAN, ST, MT
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19690206 199603 1 003

Sop Permintaan Barang

No.	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			Ket
		Kepala Bidang	Pengurus Barang	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan kebutuhan ATK/Barang persediaan kepada pengurus barang				Nota Dinas	5 menit	Tanda terima	
2	Memeriksa kesesuaian permintaan ATK/barang persediaan dengan ketersediaan/stock ATK/ barang persediaan, jika sesuai maka disetujui, jika tidak maka dikembalikan				Tanda terima, Formulir permintaan barang yang telah diisi, Data barang persediaan ATK	20 menit	Checklist kesesuaian barang permintaan dengan persediaan ATK	
3	Memeriksa kesesuaian permintaan ATK/barang persediaan dengan ketersediaan/stock ATK/ barang persediaan, jika sesuai maka disetujui, jika tidak maka dikembalikan				Checklist kesesuaian barang permintaan dengan persediaan ATK	20 menit	Checklist kesesuaian barang permintaan dengan persediaan ATK yang sudah diparaf kadis	
4	Membuat pesanan permintaan ATK/barang persediaan dan Berita Acara penyerahan ATK/barang persediaan				Checklist kesesuaian barang permintaan dengan persediaan ATK yang sudah diparaf kadis	20 menit	BA Penyerahan barang persediaan	
5	Menyerahkan ATK/barang persediaan kepada kepala bidang				BA Penyerahan barang persediaan	5 menit	ATK/barang persediaan yang diminta	

Palangkaraya, Januari 2018

Mengetahui :
 KEPALA DINAS ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
 PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

ERMAL SUBHAN, ST, MT
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19690206 199603 1 003

Sop Pengelolaan Kartu Inventaris Barang

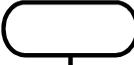
No.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			Ket
		Pengurus Barang	Pengguna Barang	Penanggung Jawab Ruangan	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Membuat BA penyerahan BMD untuk diserahkan kepada Pengguna barang/Penanggungjawab BMD					Surat Permintaan kebutuhan BMD	5 menit	Draft BA penyerahan BMD	
2	Memeriksa kesesuaian BA Penyerahan BMD yang digunakan dan atau yang ada di ruangan masing-masing dengan BA penyerahan BMD, Jika sesuai ditandatangani, jika tidak maka dikembalikan					Draft BA penyerahan BMD	30 menit	Draft BA penyerahan BMD yang telah disetujui	
3	Memeriksa kesesuaian inventarisasi BMD dengan data SIMDA BMD					Draft BA penyerahan BMD yang telah disetujui	20 menit	Checklist kesesuaian kesesuaian inventarisasi BMD dengan data SIMDA	
4	Menginput hasil inventarisasi ke dalam aplikasi SIMDA BMD dan mencetak KIR berdasarkan ruangan					Checklist kesesuaian kesesuaian inventarisasi BMD dengan data SIMDA BMD		draft KIR	
5	Meminta persetujuan KIR kepada penanggungjawab ruangan					draft KIR	20 menit	KIR yang telah disetujui penanggungjawab ruangan	
6	Meminta penandatanganan KIR kepada Penanggung Jawab Ruangan					KIR yang telah disetujui penanggungjawab ruangan	10 menit	KIR yang telah disetujui penanggungjawab ruangan	
7	Menandatangani KIR					KIR yang telah ditandatangani penanggungjawab ruangan	10 menit	KIR yang telah ditandatangani	
8	Mengesahkan KIR dan menyerahkan kembali kepada bendahara barang untuk didokumentasikan					KIR yang telah ditandatangani penanggungjawab ruangan	10 menit	KIR	
9	Melakukan pemasangan KIR pada ruangan					KIR	20 menit	KIR	

Palangkaraya, Januari 2018

Mengetahui :
 KEPALA DINAS ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
 PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

ERMAL SUBHAN, ST, MT
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19690206 199603 1 003

Sop Usulan Penghapusan Barang

No.	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			Ket
		Kasubbag Umum	Pengurus Barang	Sekretaris	Kepala Dinas	Agendaris	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menginventarisir kondisi BMD						Data BMD	5 menit	Data BMD yang telah diinventarisir	
2	Membuat draft surat usulan penghapusan BMD						Data BMD yang telah diinventarisir	30 menit	draft surat usulan penghapusan BMD	
3	Mengkoreksi dan memaraf draft surat usulan penghapusan BMD						draft surat usulan penghapusan BMD	5 menit	draft surat usulan penghapusan BMD	
4	Mengkoreksi dan memaraf draft surat usulan penghapusan BMD						draft surat usulan penghapusan BMD	5 menit	draft surat usulan penghapusan BMD	
5	Menandatangani surat usulan penghapusan BMD						draft surat usulan penghapusan BMD	5 menit	surat usulan penghapusan BMD yang telah ditandatangani	
6	Memberikan nomer surat, mendokumentasikan dan mengirimkan surat usulan ke Biro Aset						surat usulan penghapusan BMD yang telah ditandatangani	10 menit	surat usulan penghapusan BMD yang telah ditandatangani	

Palangkaraya, Januari 2018

Mengetahui :
 KEPALA DINAS ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
 PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

ERMAL SUBHAN, ST, MT
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19690206 199603 1 003